

BAB IV

UPAYA SERBIA MENDAPATKAN STATUS KEANGGOTAAN DI UNI EROPA

Pada Bab ini, penulis akan memaparkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Serbia dalam mendapatkan status keanggotaan di Uni Eropa. Dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh Serbia, penulis akan memfokuskan pada tahun 2009-2013, dimana Serbia berusaha keras untuk mendapatkan status keanggotaan penuh di Uni Eropa. Upaya-upaya tersebut penulis bagi kedalam bidang Politik, Ekonomi dan Hukum. Penulis juga akan sedikit memaparkan tentang perkembangan dari masing-masing upaya yang dilakukan. Pada bab ini juga, untuk bidang Hukum penulis akan sedikit membahas mengenai kejahatan perang yang dilakukan Serbia di masa lalu yang menjadi syarat dari negara-negara anggota Uni Eropa kepada Serbia. Berikut adalah pemaparannya;

Pembenahan Kondisi Dalam Negeri

Salah satu hal yang harus dilakukan oleh Serbia dalam upayanya untuk mendapatkan status keanggotaan di Uni Eropa adalah melakukan pembenahan kondisi dalam negerinya sendiri. Pembenahan kondisi dalam negerinya ini pun meliputi bidang politik, ekonomi dan Hukum. Hal ini dikarenakan ketiga bidang tersebut adalah hal yang menjadi hambatan Serbia dalam mendapatkan status keanggotaannya di Uni Eropa. Sehingga Serbia harus melakukan perubahan penuh agar mendapatkan status keanggotaan tersebut. Pembenahan tiga bidang kondisi dalam negeri Serbia tersebut juga merupakan salah satu syarat agar terpenuhinya kriteria Kopenhagen.

Kriteria Kopenhagen sendiri merupakan peraturan yang menetapkan apakah suatu negara layak untuk bergabung dengan Uni Eropa. Kriteria ini pun mensyaratkan bahwa suatu negara memiliki institusi untuk melindungi pemerintahan demokratis dan hak asasi manusia, memiliki ekonomi pasar yang berfungsi, dan menerima kewajiban dan tujuan dari Uni Eropa. Kriteria keanggotaan ini ditetapkan pada pertemuan Dewan Eropa Juni 1993 di Kopenhagen, Denmark. Berikut adalah kutipan dari kesimpulan Kepemimpinan Kopenhagen¹:

“Untuk menjadi anggota, negara kandidat disyaratkan untuk memperoleh stabilitas institusi yang menjamin demokrasi, aturan hukum, hak asasi manusia, penghormatan dan perlindungan kaum minoritas, keberadaan ekonomi pasar yang berfungsi dan kemampuan untuk menghadapi tekanan kompetitif dan kekuatan pasar di Uni Eropa. Negara kandidat disyaratkan memiliki kemampuan mematuhi kewajiban keanggotaan termasuk patuh dengan tujuan politik, ekonomi dan moneter Uni Eropa.”

Sebagian besar elemen ini telah diklarifikasi dalam satu dasawarsa terakhir oleh undang-undang Dewan Eropa, Komisi Eropa dan Parlemen Eropa serta hukum kasus Mahkamah Eropa dan Pengadilan Hak Asasi Eropa. Tetapi, kadang muncul penafsiran yang sedikit berbeda dari sudut pandang negara-negara anggota. Meskipun begitu Kriteria Kopenhagen ini adalah kriteria yang akan dijadikan syarat bagi setiap negara-negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa. Berikut adalah penjelasan beberapa bidang yang direformasi oleh pemerintah Serbia dalam mendapatkan status keanggotaan di Uni Eropa;

1. Bidang Politik

Serbia adalah sebuah republik parlementer, dengan pemerintah dibagi menjadi cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Serbia memiliki salah satu konstitusi modern pertama di Eropa, Konstitusi 1835 (dikenal sebagai "Konstitusi Sretenje"), yang pada saat itu dianggap sebagai konstitusi paling progresif dan

¹ *Presidency Conclusions, Copenhagen European Council 1993, 7.A.iii (pdf)*. (2017, April 22). Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_en.pdf

liberal di dunia. Sejak saat itu Serbia telah mengadopsi 10 konstitusi yang berbeda.² Konstitusi saat ini diadopsi pada tahun 2006 setelah referendum kemerdekaan Montenegro yang oleh akibatnya memperbaharui kemerdekaan Serbia itu sendiri. Mahkamah Konstitusi mengatur hal-hal yang menyangkut Konstitusi. Pemerintah Serbia Presiden Republik (Predsednik Republike) adalah kepala negara, dipilih oleh pemungutan suara untuk masa jabatan lima tahun dan dibatasi oleh Konstitusi untuk maksimal dua syarat. Selain menjadi komandan angkatan bersenjata, presiden memiliki tugas prosedural untuk menunjuk perdana menteri dengan persetujuan parlemen, dan memiliki beberapa pengaruh terhadap kebijakan luar negeri.

Serbia telah menjalin hubungan diplomatik dengan 188 negara anggota PBB, Tahta Suci, Perintah Militer Berdaulat Malta, dan Uni Eropa. Hubungan luar negeri dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri. Serbia memiliki jaringan 65 kedutaan besar dan 23 konsulat internasional. Ada 65 kedutaan asing, 5 konsulat dan 4 kantor penghubung di Serbia.³ Hubungan luar negeri Serbia. Kebijakan luar negeri Serbia difokuskan untuk mencapai tujuan strategis menjadi negara anggota Uni Eropa (UE).

Adapun beberapa kriteria politik yang dimaksudkan dalam kriteria kopenhagen, seperti;

A. Demokrasi

Ada dua pengertian utama demokrasi, pertama menyamakan demokrasi dengan prosedur demokrasi dalam pengambilan keputusan, dan ini disebut demokrasi prosedural (minimum).⁴ Selama warga memilih wakil dan institusi mereka dalam pemilihan yang bebas dan adil, hasilnya juga demokratis. Di sisi lain, ada demokrasi partisipatif yang tidak habis dalam pemilihan namun membutuhkan kebajikan warga negara tertentu. Demokrasi ini menetapkan tuntutan maksimal dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. Masyarakat semacam ini membutuhkan tingkat budaya politik dan demokrasi yang maju dan juga membutuhkan komitmen.

Pemerintahan demokratis yang berfungsi mensyaratkan agar semua warga negara bisa berpartisipasi, atas asas setara, dalam pembuatan keputusan politik di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari kotamadya setempat hingga tingkat nasional. Selain itu, perlu pula diadakannya pemilihan umum yang bebas dengan kotak suara rahasia, hak mendirikan partai politik tanpa gangguan dari negara, akses pers bebas yang adil dan setara, organisasi serikat dagang bebas, kebebasan berpendapat, dan kekuasaan eksekutif yang dibatasi hukum dan memungkinkan akses bebas kepada hakim yang bukan berasal dari golongan eksekutif.

B. HAM (Hak Asasi Manusia)

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap sebagai perumusan hak asasi manusia paling tinggi, meski kurang memiliki mekanisme penegakan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang lebih efektif. Persyaratan untuk sejajar dengan perumusan ini memaksa beberapa negara yang baru saja bergabung dengan UE untuk memberlakukan perubahan besar dalam undang-undang mereka, pelayanan publik dan sistem hukum.⁵ Banyak perubahan tersebut mencakup perlakuan etnis dan kaum minoritas beragama, atau penghapusan celah perlakuan antara faksi-faksi politik.

Dalam HAM juga terdapat penghormatan dan perlindungan kaum minoritas. Sebuah konvensi Dewan Eropa yang relevan adalah gebrakan besar dalam bidang ini. Tetapi, wilayahnya sangat

² *The Right Way is Forward: Democracy in Serbia*. (2015, April 23). Retrieved Februari 22, 2017, from <https://www.greeneuropeanjournal.eu/the-right-way-is-forward-democracy-in-serbia/>

³ *Ibid.*

⁴ Živković, Ž. (2015, April 23). *The Right Way is Forward: Democracy in Serbia*. Retrieved Februari 12, 2017, from <https://www.greeneuropeanjournal.eu/the-right-way-is-forward-democracy-in-serbia/>

⁵ *Politik Demokrasi di Serbia*. (n.d.). Retrieved Mei 16, 2017, from EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN BEOGRAD, THE REPUBLIC OF SRBIA: <http://www.kemlu.go.id/belgrade/lc/Pages/Serbia.aspx>

sensitif sehingga konvensi tersebut tidak mencakup penetapan jelas tentang kaum minoritas. Akibatnya, banyak negara penandatangan menambahkan klarifikasi resmi pada tanda tangannya mengenai kaum minoritas mana di negara mereka yang terlibat.

Konstitusi Republik Serbia yang berlaku saat ini disetujui oleh Majelis Nasional Republik Serbia pada tanggal 30 September 2006, menggantikan konstitusi yang disahkan tahun 1990.⁶ Konstitusi tersebut disahkan melalui referendum pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2006. Teks pembukaannya menganggap Provinsi Kosovo dan Metohija sebagai bagian kesatuan dari wilayah Serbia yang diberikan status otonomi substansial. Dalam konstitusi tersebut juga mengatakan bahwa Serbia sebagai negara merdeka dan menjamin Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak minoritas dan melarang hukuman mati dan kloning manusia.

1.1. Perkembangan Politik

Sejak tahun 2000, transisi politik memindahkan Serbia dengan tegas menuju demokrasi sejati.⁷ Pelajaran penting pun telah muncul dari pengalaman Serbia untuk melakukan reformasi pada bidang politik. Hal ini dapat dilihat dari sikap Serbia dalam memanfaatkan peluang dan kemudian memusatkan energi politik untuk mempertahankan momentum transisi. Titik awal transisi Serbia pada bulan Oktober 2000, sangat dipengaruhi oleh masa lalu Serbia.⁸ Sistem politik tahun 1990an bisa saja diberi label sebagai rezim otoriter yang kompetitif atau demokrasi yang tidak liberal, bukan demokrasi yang sepenuhnya matang, dan bukan otokrasi totaliter. Hal ini dikarenakan demokrasi tersebut terdiri dari tiga elemen demokrasi: (1) pemilihan bebas; (2) media yang agak bebas (dengan pegangan kuat pada media elektronik); dan (3) hak sipil dasar bagi mayoritas rakyat.

Gelombang pertama transisi politik di Serbia dimulai menjelang akhir eksistensi bekas negara-negara Federasi Yugoslavia. Hal ini dimulai ketika satu per satu negara bagian Federasi Yugoslavia menyatakan untuk memerdekakan negaranya masing-masing. Transisi pertama politik Serbia difokuskan pada isu-isu konstitusional yang panas seperti hubungan antara Serbia dan Montenegro. Pemisahan terakhir Serbia dan Montenegro membuka jalan bagi masalah konstitusional lainnya. Salah satu contoh konkritnya adalah pemisahan provinsi Serbia di Kosovo, yang memproklamkan kemerdekaan pada bulan Februari 2008. Hal ini pun tetap menjadi isu politik utama, karena hal ini menjadi bagian dari persyaratan keanggotaan di UE. Selain itu, isu konstitusional tersebut telah menghabiskan energi politik yang substansial dari transisi dan keputusan politik yang sulit yang seharusnya dilakukan dalam proses tersebut.

Selain itu, ada pengalihan politik yang disebabkan oleh tuntutan masyarakat internasional untuk menghadapi kejahatan perang di masa lalu. Seperti menghadapi tuntutan perang Yugoslavia pada tahun 1990an. Hal ini pun diwujudkan dalam permintaan UE kepada Serbia untuk berkolaborasi dengan Pengadilan Pidana Internasional yang berbasis di Den Haag untuk bekas Yugoslavia, dan ekstradisi buronan penjahat perang yang didakwa. Perdebatan luas tentang masa lalu, di bidang ini dan daerah lainnya, menghabiskan banyak energi politik dari proses transisi.

Politik di Serbia bergeser begitu jauh ke kanan, dalam waktu singkat setelah kepergian Milosevic dari kekuasaan politik. Hal ini dapat dilihat selama masa jabatan Djindjic, ada pencapaian stabilitas makroekonomi, pengurangan inflasi, adopsi inisiatif reformasi yang tampak menjanjikan, penciptaan suasana optimisme, rasa normal dan harapan yang meningkat di Serbia. Salah satu contohnya sejak awal rezim

⁶ *Background Negara Serbia dan Hubungan-Bilateral*. (n.d.). Retrieved April 18, 2017, from Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd, Republik Serbia: <https://www.kemlu.go.id/belgrade/Pages/Background-Negara-Serbia-dan-Hubungan-Bilateral.aspx>

⁷ Begović, B. (2013, Mei 30). *The Serbian Experience in Transition*. Retrieved Juni 12, 2017, from Center for International Private Enterprise: <http://www.cipe.org/publications/detail/serbian-experience-transition>

⁸ *Ibid.*

Djindjic nilai tukar disatukan dan mengembalikan kepercayaan pada mata uang. Bahkan Bank Nasional menerapkan kebijakan moneter yang ketat, mengelompokkan mata uang ke euro, kebijakan fiskal yang hati-hati diadopsi dan undang-undang privatisasi yang berorientasi investor diberlakukan. PDB per kapita naik dari \$ 1.032 dolar AS pada tahun 2000 menjadi \$ 1.879 pada tahun 2002.⁹

Kesulitan Serbia dengan proses transisi politik yang demokratis kadang-kadang dihubungkan dengan politik partai yang penuh gejolak. Selain itu juga dihubungkan dengan beberapa faktor spesifik lainnya seperti hubungan Serbia dengan Amerika Serikat dan UE, isu kompleks Kosovo atau kurangnya kerja sama pemerintah tribunal Den Haag. Semua masalah ini relevan dengan perkembangan politik Serbia. Pada saat bersamaan, aspek evolusi politik internal Serbia sering diabaikan, khususnya proses pembangunan institusi. Hal tersebut terjadi karena terganggu oleh pertengkaran politik, skandal dan drama psiko-drama yang membentuk lanskap politik Serbia.

Ketika wilayah Balkan menghadapi perang sipil yang tragis, demokrasi adalah janji kehidupan yang lebih baik dan berbeda. Setelah periode itu, Serbia mengalami pasang surut, namun demokrasi selalu menang. Setiap pemerintahan berturut-turut dipilih oleh kehendak warga Serbia, pada pemilihan yang bebas dan adil. Komunitas internasional dapat membantu dalam menjaga konsolidasi demokrasi dan reformasi yang terus berlanjut di Serbia. Penjahat perang harus diadili dan pejabat internasional harus menyadari bahwa dibutuhkan banyak waktu dan keterampilan politik bagi masyarakat untuk melepaskan diri dari masa lalu.

Setelah fragmentasi partai yang cukup besar dari akhir 2000 sampai akhir 2003, saat ini hanya ada enam partai yang berada di legislatif.¹⁰ Pada tanggal 28 Desember 2003, munculah sebuah fase baru dalam pembangunan pasca-Milosevic, yaitu adanya pemilihan parlemen. Dari hasil pemilihan tersebut, dapat dilihat bahwa Partai Radikal Serbia, yang dipimpin oleh Tomislav Nikolic, menerima 28 persen suara dan 82 kursi di Majelis Nasional Serbia dari 250 kursi. Sedangkan, Partai Demokratik Serbia (DPS), yang dipimpin oleh Vojislav Kostunica, mendapat 18 persen suara dan 53 kursi. Partai Demokrat yang dipegang oleh Perdana Menteri Zoran Djindjic yang terbunuh, menerima 13 persen suara dan mengumpulkan 37 kursi. Partai G-17 Plus, yang dipimpin oleh Miroljub Labus, memenangkan 34 kursi dan 11,5 persen suara. Dan Vunt Draskovic's Serbia Renewal Movement (SRM) menerima 7,7 persen suara dan 22 kursi bersekutu dengan partai kecil bernama New Serbia (NS).¹¹

1.2. Transformasi bidang politik

Jalan Serbia menuju demokrasi lebih sulit daripada negara-negara Yugoslavia lainnya, karena peraturan lama Milosevic. Konflik tahun 1990-an di Bosnia dan Herzegovina, Kroasia dan Kosovo menghancurkan negara tersebut. Setelah bertahun-tahun melakukan tindakan masyarakat sipil terhadap pemerintahannya, dia akhirnya digulingkan pada tanggal 5 Oktober 2000. Pada tahun-tahun berikutnya, perselisihan pendapat pro-Barat dan partai sayap kanan atas arahan negara ini menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi Serbia.

Pembunuhan Perdana Menteri pro-reformasi Zoran Djindjic pada tahun 2003 membuka hubungan mendalam antara politik dan mafia.¹² Meskipun institusi dan proses demokrasi telah diperkenalkan sejak lama, namun partai-partai terpilih yang dianggap demokratis, sayap kiri dan sayap kanan sama-sama terlibat

⁹ Cohen, L. J. (2011, Juli 7). 294. *Democratic Consolidation in Serbia: Pitfalls of the Post-Djindjic Transition*. Retrieved Mei 22, 2017, from <https://www.wilsoncenter.org/publication/294-democratic-consolidation-serbia-pitfalls-the-post-djindjic-transition>

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Pasic, L. (2016, April 3). *Democracy, 25 years after Yugoslavia*. Retrieved Juni 27, 2017, from <https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/lana-pasic/democracy-25-years-after-yugoslavia>

dalam korupsi selama kesepakatan privatisasi. Pemerintah pro-Eropa saat ini juga telah melakukan sejumlah kesepakatan privatisasi rahasia, termasuk penjualan industri otomotif, pabrik baja dan Perusahaan Udara Yugoslavia.

Terlepas dari kehadiran institusi, praktik dan peraturan demokratis, pemahaman demokrasi yang sebenarnya belum diadopsi oleh perwakilan politik atau pemilih. Seperti banyak negara demokrasi baru lainnya yang telah muncul di tempat lain dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat Serbia sekarang dapat dengan bebas memilih pemimpin mereka sendiri. Tapi para pemimpin ini akan tunduk pada perintah ibukota Barat. Namun, sejarah perlawanan Serbia terhadap kedua kekuatan imperialisme Barat dan ultra-nasionalisme reaksioner membuat harapan bahwa Serbia yang lebih progresif dan demokratis akan muncul.

Selain itu, Parlemen Serbia harus mengembangkan mekanisme untuk debat publik dan inisiatif masyarakat, untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik. Pemerintah daerah harus memiliki pendapatan lebih langsung, bukan uang yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dan ekonomi harus dimulai "dari bawah", dan juga harus lebih demokratis. Serbia harus mengarahkan ekonominya terhadap usaha kecil dan menengah, pekerjaan berkelanjutan, dan ekonomi yang tidak mengkonsumsi banyak sumber daya. Ekonomi yang bekerja untuk orang dan lingkungan. Dua puluh lima tahun setelah disintegrasi Yugoslavia, semua negara bagian adalah negara-negara yang secara formal demokratis: ada pemilihan reguler multi partai, pemisahan kekuasaan yang jelas, institusi demokratis dan bahasa demokratis yang mapan.

Pengembangan mekanisme demokrasi harus dilakukan karena sebelumnya di Serbia, baik pemerintah yang bertanggung jawab, *checks and balances*, *rule of law* mau pun kebebasan berbicara sebagian besar tidak hadir dalam praktik politik di wilayah ini. Nepotisme, inefisiensi administratif, belanja publik dan korupsi telah menjadi norma, dan menghalangi proses demokrasi. Sumber daya publik dikendalikan oleh elit partai politik, yang memegang pengaruh atas kekuatan media, kehakiman dan kepolisian. Partai politik di negara penerus sendiri tidak demokratis. Meskipun pemerintahan komunis berakhir, pemujaan terhadap satu pemimpin politik dengan kekuatan tak terbatas tetap ada, seperti yang terjadi pada Aleksandar Vucic di Serbia. Ketiadaan demokrasi partai internal ini kemudian dialihkan ke arena politik yang lebih luas.

Pada tahun 2011, Freedom House melaporkan adanya penurunan di bidang independensi media, pemerintahan demokratis nasional dan proses pemilihan.¹³ Serbia telah melihat banyak skandal korupsi, termasuk suap yang menghina peraturan misi ketenagakerjaan Uni Eropa (EULEX) dan korupsi dalam prosedur pengadaan publik. Rendahnya tingkat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk pemilihan, dan juga rendahnya minat untuk berpartisipasi, karena kepercayaan yang terbatas terhadap pemerintahan dan demokrasi, juga menjadi hambatan bagi perkembangan demokrasi Serbia. Secara regional, jumlah pemilih pemilu rendah, dan tidak ada kepercayaan pada kemampuan perwakilan atau kemampuan perwakilan politik terpilih untuk bertindak sesuai kepentingan publik. Ada ketergantungan keseluruhan pada modal dan pinjaman luar negeri, pemborosan keuangan dan kesalahan manajemen, korupsi yang meluas dalam kesepakatan privatisasi, dan negara-negara ini sekarang gagal menanggapi krisis ekonomi dan sosial.

Namun saat ini, semua partai politik di parlemen Serbia hari ini 'pro-Eropa'. Mayoritas dari mereka mengadopsi undang-undang dalam proses harmonisasi dengan Uni Eropa dengan sangat cepat. Banyak arahan diperkenalkan ke dalam undang-undang dengan prosedur mendesak, tanpa debat publik atau sikap kritis terhadap mereka. Kekuatan politik baru di Serbia harus mengembangkan agenda politik, ekonomi dan sosial lokal mereka yang akan mengartikulasikan kepentingan warga negara, bukan elite politik dan perusahaan besar. Selain itu, Serbia juga memperkuat legitimasinya dalam melakukan aktivitas diplomasi dengan negara lain. Bahkan Serbia akan lebih mudah menjalin diplomasi untuk melakukan kerjasama

¹³ *Ibid.*

dengan negara-negara di luar Eropa apabila Serbia menjadi anggota Uni Eropa. Hal ini pun dikarenakan kuatnya legitimasi politik Uni Eropa di mata dunia Internasional.

2. Bidang Ekonomi

Dalam melakukan upaya untuk mendapatkan status keanggotaan di Uni Eropa, Serbia melakukan reformasi dalam bidang ekonomi. Reformasi ekonomi sendiri menjadi hal yang sangat penting bagi suatu negara untuk melakukan integrasi. Hal ini pun dilakukan untuk dapat menyeimbangkan ekonomi negara Serbia dengan ekonomi Uni Eropa, yang dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan dengan Serbia. Menurut Paul A. Samuelson, ekonomi adalah ragam cara yang digunakan oleh seorang atau sekumpulan manusia dalam memanfaatkan sumber-sumber terbatas untuk mendapatkan berbagai macam produk dan komoditi serta mendistribusikannya agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak.¹⁴ Ekonomi sendiri menjadi sumber pendapatan yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara.

Perubahan yang dilakukan pada bidang ekonomi juga merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap negara calon kandidat anggota Uni Eropa untuk mendapatkan status keanggotaan di Uni Eropa. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu syarat yang terdapat pada kriteria Kopenhagen. Dalam kriteria Kopenhagen disebutkan bahwa kriteria ekonomi secara luas mensyaratkan agar negara-negara kandidat memiliki ekonomi pasar yang berfungsi. Selain itu, produsen mereka harus mampu menghadapi tekanan kompetitif dan kekuatan pasar di Uni Eropa. Bahkan dalam kriteria ekonomi sendiri, mengenai kriteria pergeseran euro dan mekanisme nilai tukar Eropa telah digunakan untuk mempersiapkan negara-negara yang bergabung dengan Zona Euro, baik anggota pendiri maupun non-pendiri.¹⁵

Dalam pembahasan bidang ekonomi ini, akan dijelaskan mengenai perkembangan ekonomi Serbia serta transformasi-transformasi apa yang dilakukan dalam bidang ekonomi tersebut. Berikut adalah pemaparannya;

2.1. Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi sendiri adalah kenaikan dalam jangka panjang dari satu negara untuk menyediakan banyak barang ekonomi yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penduduk.¹⁶ Kemampuan sebuah negara yang bisa mengembangkan ekonomi ini biasanya dilihat dari kemajuan dari bidang teknologi, atau pun penyesuaian dari lembaga dan juga ideologi dari negara tersebut. Pada dasarnya, perkembangan ekonomi merupakan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi, dimana terjadi sebuah perubahan kondisi dari perekonomian suatu negara yang secara berkesinambungan menuju ke keadaan yang lebih baik selama satu periode. Dalam hal ini, Serbia pun melakukan berbagai upaya transformasi dalam bidang-bidang ekonomi tertentu untuk dapat meningkatkan produksi atau pun hasil dari sumber daya yang dimiliki oleh Serbia untuk jangka waktu yang panjang.

Adanya perkembangan ekonomi ini pun juga tidak jauh dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri merupakan suatu proses kenaikan suatu pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan adanya perubahan fundamental di dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk di suatu

¹⁴ *PENGERTIAN EKONOMI :: Definisi dan Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli.* (2016, July 18). Retrieved April 12, 2017, from Ekonomi.com: <http://www.ekonomi.com/016/07/pengertian-ekonomi.html>

¹⁵ *Presidency Conclusions, Copenhagen European Council 1993, 7.A.iii (pdf).* (2017, April 22). Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_en.pdf

¹⁶ *Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi.* (2016, Februari 24). Retrieved April 22, 2017, from <http://www.mybusiness.id/pertumbuhan-dan-perkembangan-ekonomi/>

negara tersebut.¹⁷ Adapun faktor-faktor dari perkembangan ekonomi, yaitu; Sumber Daya, IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), Budaya dan Modal.

Pertama, adanya sumber daya, baik itu sumber daya alam atau pun sumber daya manusia. Sumber daya merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan, dalam proses pembangunan ekonomi, cepat atau lambatnya bergantung dari Sumber daya manusia (SDM) yang menjadi subjek dalam pembangunan dan kompetensi yang dimiliki memadai untuk proses perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Selain itu, Sumber Daya Alam (SDA) di sebagian besar dari negara berkembang, menjadikan perkembangan ekonomi negaranya bergantung dari SDA yang dimiliki. Akan tetapi, jika sebuah negara tersebut memiliki SDA yang baik namun tidak didukung dengan kualitas SDM yang berkualitas, maka tidak akan mudah untuk mendapatkan hasil produksi yang baik dari SDA.

Kedua, IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara khususnya dalam bidang teknologi. Hal ini pun dikarenakan, perkembangan teknologi yang canggih berdampak pada proses perkembangan ekonominya juga lebih cepat. Ketiga, budaya juga memberikan dampak tersendiri dalam proses perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor budaya memiliki fungsi untuk membangkitkan dan mendorong terjadinya proses pengembangan dan pembangunan ekonomi.¹⁸ Terakhir adalah modal yang menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan ekonomi. Modal sendiri juga berkesinambungan dengan SDM. Modal menjadi salah satu kebutuhan yang penting untuk proses perkembangan ekonomi. Hal ini dikarenakan, modal inilah yang nantinya akan meningkatkan hasil produktivitas dari pekerjaan yang akan dikerjakan.

Selain melakukan transisi pada bidang politik, di tahun 2000 juga Serbia menciptakan kesempatan untuk mengejar reformasi ekonomi sebagai keadaan yang mendesak serta mengembangkan ekonomi pasar. Jika melihat ke belakang, tantangan terbesar dalam proses reformasi ekonomi adalah reformasi institusional. Terutama perjuangan terus-menerus untuk mencapai *rule of law* sebagai landasan untuk pertukaran bebas. Meskipun terjadi keruntuhan ekonomi pada akhir tahun 1990an, konstelasi ekonomi politik yang digambarkan adalah kepentingan elit yang sangat stabil pada saat itu. Dengan demikian, perubahan ekonomi merupakan prasyarat untuk transisi Serbia menuju lebih baik.

Sistem ekonomi Serbia sendiri pada tahun 2000 adalah sejenis rezim hibrida yang menggabungkan sosialisme yang telah runtuh pada awal 1990an dengan unsur-unsur ekonomi pasar.¹⁹ Dalam sistem ekonomi tersebut kepemilikan pribadi dan kewiraswastaan swasta merupakan hal yang legal, namun perlindungan hak kepemilikan pribadi lemah. Mekanisme pasar saat ini di Serbia beroperasi pada pasar modal dan pasar tenaga kerja. Sementara pasar produk sudah ada dalam mekanisme pasar sosialisme di Yugoslavia. Meskipun demikian, intervensi pemerintah yang sewenang-wenang merusak mekanisme pasar. Transparansi dan prediktabilitas tidak ada dalam regulasi pasar. Satu-satunya hal yang ada pada mekanisme pasar tersebut adalah perlindungan perusahaan domestik incumbent dan hambatan terhadap perdagangan bebas (hambatan tarif dan non-tarif, subsidi, dan batasan anggaran lunak). Yang mana dalam hal ini menghasilkan keuntungan monopoli yang substansial.

Di tahun 2008, Serbia menghadapi beberapa tantangan ekonomi, beberapa di antaranya didorong oleh faktor eksternal (seperti gejolak keuangan global dan krisis zona euro), namun beberapa di antaranya didorong oleh faktor internal (ketidakstabilan ekonomi makro, transisi ekonomi yang tidak lengkap, banjir,

¹⁷ Susanto, B. (2017, Februari 24). *Pengertian Perkembangan Ekonomi dan Penjelasannya Lengkap*. Retrieved April 22, 2017, from <http://www.spengetahuan.com/2017/02/pengertian-perkembangan-ekonomi-dan-penjelasannya-lengkap.html>

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Begović, B. (2013, Mei 30). *The Serbian Experience in Transition*. *Op.cit.*

dan lain-lain).²⁰ Dampak krisis ekonomi tersebut masih cukup besar pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat Serbia. Krisis tersebut menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan masyarakat Serbia secara umum. Semakin terbatasnya kemampuan keuangan negara, telah mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan efisiensi anggaran diberbagai sektor termasuk pemotongan gaji dan pensiun.²¹ Sampai tahun 2008, model pertumbuhan ekonomi Serbia didorong oleh impor dan konsumsi, yang dibiayai oleh pendapatan privatisasi dan pinjaman. Hal ini lah yang menyebabkan Serbia mengalami ketidakseimbangan makro ekonomi yang besar, termasuk defisit fiskal dan *current account*, tingginya tingkat pengangguran dan inflasi yang bergejolak.

Untuk membalikkan tren dan menempatkan negara pada jalur pertumbuhan yang dinamis dan berkelanjutan, yang dipimpin oleh investasi dan impor, perlu dilakukan reformasi ekonomi yang terdiri dari stabilisasi makro ekonomi dan menghapus hambatan untuk melakukan bisnis. Agenda reformasi dilaksanakan dengan pengaturan yang Serbia hadapi dengan IMF pada tahun 2013, dan tiga revisi positif tersebut menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program ambisius tersebut.

Meski hasil pertama cukup menjanjikan, ambisius Serbia jauh lebih tinggi. Serbia ingin meningkatkan pertumbuhannya dengan membuka dan meningkatkan pendorong pertumbuhan utama - modal fisik dan modal manusia, serta teknologi. Investasi pada modal fisik di Serbia masih seperenam lebih rendah dari tingkat yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang ditargetkan di atas 4%.²² Serbia juga bermaksud untuk meningkatkannya dengan meningkatkan investasi publik di bidang infrastruktur dan menciptakan lingkungan yang ramah untuk investasi swasta yang cukup besar, dengan menangani pita merah dan meningkatkan efisiensi sistem hukum.

2.2 Transformasi bidang Ekonomi

Serbia adalah ekonomi berpendapatan menengah-atas dan telah membuat kemajuan terbesar di wilayah ini dalam hal nilai demokrasi secara keseluruhan dan transformasi ekonomi dan pemerintahan secara keseluruhan.²³ Dari segi geografis, Serbia berada di tengah Eropa. Namun dalam hal tingkat perkembangan Serbia jauh di bawah rata-rata Eropa. Sementara dalam hal faktor pertumbuhan Serbia hampir mendekati puncak. Hal ini pun menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan di Serbia sangat besar. Daya saing dan pertumbuhan ekonomi menjadi isu yang semakin menantang di dunia global yang tidak stabil.

Sejak perubahan politik pada bulan Oktober 2000 membuka pintu bagi transisi ekonomi Serbia. Langkah pertama yang dilakukan adalah stabilisasi makroekonomi. Tanpa stabilisasi tidak ada penilaian ekonomi yang jelas dan juga pengambil keputusan tidak memperhatikan hasil reformasi. Stabilisasi makroekonomi dapat dicapai melalui kebijakan moneter yang ketat, seperti pencetakan uang dihentikan dan konsolidasi defisit kuasi-fiskal hingga anggaran. Inflasi pun dapat turun seketika meski sebagian besar kontrol harga telah dihapus.

Langkah kedua adalah liberalisasi harga penuh, termasuk penghapusan beberapa nilai tukar. Bank Sentral Serbia telah menerapkan kebijakan nilai tukar mata uang tetap. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas makroekonomi sementara dengan adanya bantuan luar negeri mengalir ke Serbia. Kemudian dalam pasar domestik, liberalisasi harga yang terjadi selama tahap transisi ini penting agar produk pasar

²⁰ *Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi*. (2016, Februari 24). Retrieved April 22, 2017, from <http://www.mybusiness.id/pertumbuhan-dan-perkembangan-ekonomi/>

²¹ *Background Negara Serbia dan Hubungan-Bilateral*. *Op.cit.*

²² Begović, B. (2013, Mei 30). *The Serbian Experience in Transition*. *Op.cit.*

²³ *Studi Hukum di Serbia 2017*. (n.d.). Retrieved April 20, 2017, from <https://www.lawstudies.co.id/Serbia/>

lokal dapat berfungsi. Dengan mempertimbangkan pasar domestik Serbia yang kecil, langkah ketiga dalam transisi adalah liberalisasi perdagangan luar negeri. Semua penghalang non tarif dihapuskan dan tarif dikurangi dan disederhanakan secara substansial.

Kemudian, langkah selanjutnya dalam transisi difokuskan pada restrukturisasi ekonomi Serbia. Langkah struktural yang paling penting adalah privatisasi. Langkah tersebut diperkenalkan pada bulan Juni 2001, sembilan bulan setelah memasuki masa transisi.²⁴ Menjadi negara yang terlambat untuk transisi adalah keuntungan bagi Serbia. Karena privatisasi Serbia dimulai sekitar 10 tahun setelah gelombang privatisasi pertama di Eropa Tengah dan Timur. Sehingga Serbia pun dapat mempelajari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di negara-negara tersebut. Dengan demikian, Serbia memulai dengan model privatisasi yang agak kuat berdasarkan pada menjual perusahaan ke penawar tertinggi. Bahkan, pemerintah Serbia mengiklankan privatisasi sebagai obat mujarab untuk penyakit ekonomi daerah, dan menciptakan harapan yang tidak dapat dipenuhi dalam jangka pendek atau dalam satu siklus pemilihan.

Reformasi ekonomi struktural yang sedang Serbia lakukan akan menjadi kunci untuk membuka kesempatan menjadi anggota Uni Eropa. Hal ini juga dikarenakan, Serbia diperkirakan akan menjadi harimau ekonomi di Eropa selatan. Reformasi struktural Serbia tunjukkan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, dengan melakukan reformasi peningkatan kualitas semua tingkat pendidikan, yang telah ditunda sejak lama. Serbia tidak hanya menginginkan pertumbuhan yang cepat, tapi juga pertumbuhan yang cerdas dan berkelanjutan, yang akan mengakibatkan Serbia mencapai tingkat perkembangan rata-rata Uni Eropa. Sebuah paket reformasi, dikombinasikan dengan keuntungan alami dari posisi geografis Serbia, jaringan perjanjian perdagangan bebas dan stabilitas politik kita yang luas harus membawa kita pada tingkat pertumbuhan alami 4-5% per tahun di tahun-tahun depan.²⁵

Serbia sendiri memiliki posisi yang strategis di kawasan Eropa dan memiliki potensi besar di bidang perekonomian, khususnya sektor pertanian. Sektor pertanian adalah sektor unggulan Serbia yang didukung dengan faktor lahan dan cuaca yang mendukung serta fasilitas penelitian dan pengembangan yang maju dan memiliki reputasi internasional. *Skill* SDM Serbia yang terampil dan relatif murah untuk kawasan UE menjadikan Serbia sebagai tempat yang menarik untuk pengembangan kerja sama bisnis atau pun perdagangan dan investasi. Saat ini Serbia adalah negara yang memiliki potensi sebagai "hub" perdagangan dan distribusi dengan akses ke pasar 1 miliar penduduk dengan skema perdagangan bebas/pengaturan perdagangan.

Keberhasilan penyelesaian reformasi ekonomi, tingkat pertumbuhan dan finalisasi negosiasi akses Uni Eropa yang lebih tinggi pada akhir dekade ini akan mewakili sertifikasi final dan formal keberhasilan Serbia dalam transisi ekonomi, sosial dan politik ke demokrasi Eropa yang berorientasi pasar dan liberal. Meski berada di persimpangan jalan antara Timur dan Barat, Serbia berkomitmen untuk menciptakan sistem sosial dan ekonomi berdasarkan standar Barat. Selain itu Serbia juga akan meningkatkan hubungan ekonomi dengan mitra Timur Serbia, baik dari sisi investasi maupun perdagangan. Hal ini pun dilakukan, agar Serbia dapat bersaing dengan anggota-anggota Uni Eropa dalam pasar bebas Eropa.

Untuk dapat bersaing dalam pasar bebas Eropa, Serbia pun melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut sebagai bentuk salah satu transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Serbia. Pada tanggal 29 April 2008, Perjanjian Sementara Perdagangan dan isu-isu terkait antara Serbia dan Uni Eropa ditandatangani di Luxembourg.²⁶ Kemudian, pada tanggal 9 September 2008, Perjanjian Sementara Perdagangan dan isu-isu terkait, diratifikasi oleh Majelis Nasional Serbia. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2009, pemerintah Serbia mengimplementasikan Perjanjian Perdagangan Sementara dengan Uni Eropa.

²⁴ Begović, B. (2013, Mei 30). *The Serbian Experience in Transition. Op.cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Mengapa Serbia Masih Belum Diterima Di Uni Eropa? (2013, Mei 25). Op.cit.*

Komisi Eropa pun memutuskan untuk menempatkan Serbia dalam daftar perjanjian Schengen, tanggal 30 November 2009. Lalu pada tanggal 7 Desember 2009, Komisi Eropa memutuskan untuk menerapkan kesepakatan Perdagangan Interim dengan Serbia.²⁷ Dalam hal transformasi ekonomi yang dilakukan Serbia sejak kesepakatan perdagangan interim tersebut, perdagangan internasional menempati posisi penting dalam perekonomian Serbia. Berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dimiliki Serbia dengan negara-negara sekitar termasuk dalam kerangka seperti CEFTA, EFTA, Uni Eropa, Rusia, Turki, Kazakhstan, Belarus dan AS. Serbia juga memiliki jaringan perdagangan yang lain di berbagai negara. Selain itu juga modal dasar yang dimiliki Serbia seperti SDM, kebijakan, posisi geografis dan secara historis merupakan pusat kegiatan di kawasan, menempatkan Serbia dalam posisi strategis untuk dikembangkan sebagai "hub" produk, komoditas dan tujuan wisata.²⁸

Meskipun Serbia membuka diri untuk melakukan kerja sama perdagangan dengan mitra seluruh dunia, namun prioritas kebijakan ekonomi luar negeri Serbia diarahkan pada sejumlah mitra utama yakni Uni Eropa, Rusia, Tiongkok dan negara eks-Yugoslavia. Hal ini pun dilakukan Serbia mengingat bahwa salah satu syarat menjadi anggota Uni Eropa adalah dapat bersaingnya ekonomi Serbia di dalam pasar bebas Uni Eropa. Kawasan Eropa tetap menjadi pasar ekspor, pemasok impor, dan sumber investasi favorit bagi pelaku usaha Serbia. Rata-rata sekitar 87,5% dari ekspor dan impor Serbia setiap tahunnya dilakukan dengan negara-negara di kawasan Eropa, baik secara bilateral maupun dalam kerangka kerja sama ekonomi regional.²⁹

Serbia sendiri merupakan negara tujuan investasi yang memberikan kemudahan dan insentif baik di tingkat pusat maupun daerah. Contoh kemudahan yang dimaksud seperti kemudahan administratif, pemberian insentif atas setiap tenaga kerja yang dipekerjakan, pemberian *tax holiday* hingga 10 tahun, maupun pemberian lahan untuk pembangunan industri dan berbagai infrastruktur dasar yang tersedia di kawasan-kawasan industri (*industrial estate*) seperti jaringan listrik, saluran air, saluran pembuangan, jaringan telepon dan infrastruktur jalan. Bidang investasi sudah dimulai sejak transisi dari sistem sosialis ke perekonomian pasar pada tahun 2001, Serbia semakin membuka diri terhadap investasi asing. Sejumlah perusahaan multinasional telah menanamkan modal di Serbia. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya di industri makanan dan minuman, IT, energi, perbankan, baja, ban, otomotif, retail, telekomunikasi dan tekstil. Negara investor terbesar *Foreign Direct Investment* (FDI) di Serbia tahun 2005-2016 diantaranya Austria, Luxemburg, Jerman, Italia, Belanda, Yunani, Rusia dan Swiss.

Dengan kebutuhan investasi yang semakin mendesak, Pemerintah Serbia meluncurkan sebuah program privatisasi perusahaan dengan berbagai insentif untuk mendukung efisiensi dan daya saing. Program tersebut digunakan untuk mengatasi permasalahan keuangan pada sektor swasta yang terkena dampak krisis hutang Eropa. Selain itu, program tersebut juga dapat menyelamatkan perusahaan yang dililit hutang atau diambang kebangkrutan karena kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Dalam periode 2001-2012 diperkirakan sekitar 3.000 perusahaan telah diprivatisasi.³⁰ Untuk menarik minat investasi asing, Pemerintah Serbia pun memfokuskan ekonominya pada bidang industri otomotif, ICT dan layanan bersama, pertanian, industri makanan dan minuman, tekstil, pengerjaan logam (*metalworking*) dan industri mesin bangunan.

Selain perdagangan internasional dan investasi asing, Serbia juga memiliki sumber pemasukan lainnya untuk ekonomi negara. Sumber pemasukan ekonomi atau pendapatan negara tersebut ada pada

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Background Negara Serbia dan Hubungan-Bilateral.* (n.d.). Retrieved April 18, 2017, from Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd, Republik Serbia: <https://www.kemlu.go.id/belgrade/Pages/Background-Negara-Serbia-dan-Hubungan-Bilateral.aspx>

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

bidang pariwisata. Pariwisata telah menjadi salah satu sumber *income* terbesar bagi Serbia. Peluang pengembangan sektor pariwisata Serbia cukup besar. Hal ini dikarenakan letak strategis Serbia yang berada di *crossroad* kawasan Balkan. Kondisi ini menjadikan Serbia sebagai salah satu destinasi wisata alternatif yang potensial.

Salah satu lokasi yang memberikan peluang besar bagi pengembangan pariwisata di Serbia adalah Perlintasan sungai Danube dan Sava. Lokasi tersebut menjadi salah satu wisata sungai di Serbia. Pada masa pemerintahan PM Vucic, terdapat salah satu proyek mercusuar pengembangan sektor pariwisata Serbia yang diusung. Nama dari proyek tersebut oleh adalah "*Belgrade City on Water Projects*".³¹ Proyek tersebut merupakan proyek kerjasama jangka panjang antara pemerintah Serbia dengan konsorsium investor Uni Emirat Arab. Proyek tersebut hingga saat ini masih terus dipersiapkan pelaksanaannya. Tujuan akhir proyek ini adalah untuk menjadikan Beograd menjadi salah satu pusat bisnis dan investasi serta pariwisata yang bergengsi di kawasan Balkan.

Pembangunan ekonomi menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah negara di tengah percaturan globalisasi saat ini. Pembangunan ekonomi dan transformasi ekonomi yang mapan tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi Serbia. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Serbia (GDP) dan juga dapat meningkatkan daya saing Serbia dengan pasar bebas Uni Eropa. Hal ini pun dapat terlihat pada tahun 2013, dimana perekonomian Serbia meningkat sebesar 2,6% yang memberikan harapan dimulainya fase pemulihan.³²

3. Bidang Hukum

Dalam melakukan upaya untuk mendapatkan status keanggotaan di Uni Eropa, Serbia sebagai negara kandidat calon anggota Uni Eropa juga melakukan upaya perubahan dalam bidang Hukum. Hukum sendiri adalah suatu system yang mana untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol, hukum juga aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam lingkup masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah ketentuan ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

Tujuan hukum ini mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentruman, kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melalui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan basis ketentuan hukum yang berlaku, kemudian hukum itu sendiri bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap individu tidak dapat menjadi hakim atas dasar dirinya sendiri.

Hukum sendiri dapat dibagi dalam berbagai bidang, diantaranya hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang – undangan dan hukum pidana sendiri dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran sedangkan hukum perdata disebut juga sebagai hukum privat yang mana salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan antara individu – individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu.

³¹ *Ibid.*

³² *Background Negara Serbia dan Hubungan-Bilateral. Op.cit.*

3.1. Perkembangan Hukum

Serbia memiliki sistem hukum perdata, yang berarti hukum dikodifikasi.³³ Hal tersebut dapat diartikan bahwa pengadilan hanya menafsirkan undang-undang dan bukan terikat oleh preseden (peraturan yang ditetapkan dalam kasus hukum sebelumnya). Sehingga dalam hukum Serbia tidak ada doktrin preseden. Dalam hukum Serbia, parlemen adalah legislator tertinggi. Badan-badan tertentu dengan kekuasaan eksekutif, seperti pemerintah dan kementerian, berkompeten untuk mengeluarkan keputusan dan undang-undang di wilayah tertentu. Meskipun harus sesuai dengan undang-undang parlementer.

Sedangkan untuk organisasi sistem pengadilan di Serbia dan yurisdiksi pengadilan diatur oleh Undang-undang tentang Peradilan. UU tersebut berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010.³⁴ Sistem pengadilan di Serbia terdiri dari Mahkamah Konstitusi, pengadilan yurisdiksi umum dan pengadilan yurisdiksi khusus. Mahkamah Konstitusi memutuskan konstitusionalitas dan legalitas undang-undang dan undang-undang, serta melindungi hak dan kebebasan manusia dan minoritas. Sedangkan, Pengadilan dasar adalah pengadilan tingkat pertama dan dibentuk untuk mencakup satu atau lebih kotamadya. Pengadilan yang lebih tinggi dibentuk untuk mencakup wilayah satu atau lebih pengadilan dasar dan juga pengadilan tingkat pertama, sementara dalam kasus yang terbatas mereka bertindak sebagai pengadilan tingkat kedua terhadap pengadilan dasar.

Pengadilan komersial mengadili masalah komersial, dengan Pengadilan Banding Komersial menjadi pengadilan kedua untuk masalah ini. Pengadilan banding adalah pengadilan kedua untuk pengadilan dasar dan tinggi (kecuali dalam kasus terbatas ketika pengadilan yang lebih tinggi bertindak sebagai pengadilan kedua terhadap pengadilan dasar), Pengadilan Kasasi Agung adalah pengadilan tertinggi di Serbia dan kompeten untuk memutuskan pemulihan yudisial yang luar biasa. dan konflik yurisdiksi. Pengadilan yang melanggar hukum adalah pengadilan tingkat kedua karena pelanggaran ringan yang diperintah oleh otoritas negara pada tingkat pertama, dan juga pengadilan tingkat pertama karena pelanggaran ringan yang oleh pihak berwenang negara tidak kompeten pada tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha berwenang untuk mengadili dalam perselisihan administrasi.

Dalam hukum Serbia terdapat kebebasan kontrak. Maksudnya adalah pihak-pihak yang terikat kontrak bebas menentukan hukum substantif mana yang mengatur kontrak. Dan hukum Serbia tidak harus mengatur hukum kontrak yang ditandatangani di Serbia. Hal ini dikarenakan, UU dan peraturan yang paling penting mengenai investasi di Serbia. Ada banyak sumber hukum di Serbia, seperti: piagam, kontrak dengan Dubrovnik, kompilasi hukum Bizantium yang diterjemahkan di Serbia, Undang-Undang Dueka, Undang-Undang Pertambahan oleh Stefan Lazarević, dan undang-undang kota-kota pesisir.³⁵ Charters adalah tindakan hukum yang dibuat untuk banyak alasan hukum. Itu adalah hibah yang diberikan oleh para penguasa ke gereja dan wihara dengan manfaat. Mereka ditulis sedemikian rupa sehingga ada bentuk, pengantar, teks, dan kesimpulan yang pasti.

Adapun hukum yang mengatur aktivitas bisnis dan transaksi yang mengatur perusahaan asing di Serbia meliputi³⁶: Hukum Penanaman Modal Asing; Hukum Perdagangan Luar Negeri; Hukum Operasi Valuta Asing; Hukum Pasar Efek dan Instrumen Keuangan lainnya; Hukum perusahaan; Hukum Pendaftaran Perusahaan Komersial; Hukum Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; Peraturan tentang Ketentuan untuk Pembentukan dan Operasi Kantor Perwakilan Asing di Serbia; Hukum tentang Leasing Keuangan; Hukum Konsesi; dan UU Privatisasi. UU tersebut menetapkan peraturan dasar yang harus

³³ *Framework of the Serbian Legal System*. (2017, April 7). Retrieved Mei 12, 2017, from <http://eurolinkgeie.com/en/framework-of-the-serbian-legal-system/>

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

dipatuhi oleh perusahaan asing jika mereka ingin mendirikan anak perusahaan di Serbia, berinvestasi di perusahaan lokal, membuka kantor perwakilan di Serbia, menandatangani perjanjian agensi untuk perwakilan oleh perusahaan lokal, memperoleh konsesi untuk eksploitasi alam sumber daya dan berpartisipasi dalam proses privatisasi di Serbia.

3.2. Transformasi Hukum

Perubahan dalam bidang hukum, merupakan salah satu syarat yang diajukan oleh Uni Eropa untuk mendapatkan status keanggotaan di Uni Eropa. Perubahan dalam bidang hukum yang dilakukan oleh Serbia adalah melakukan kerjasama dengan pengadilan pidana internasional untuk bekas Yugoslavia atau ICTY (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*). ICTY adalah sebuah badan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang didirikan untuk mengadili para penjahat kriminal perang di Yugoslavia. Tribunal ini berfungsi sebagai sebuah pengadilan ad-hoc yang merdeka.

Badan ini didirikan oleh resolusi 827 dari Dewan Keamanan PBB pada tanggal 25 Mei 1993. Badan ini memiliki yuridiksi mengenai beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan di wilayah mantan negara Yugoslavia yaitu pelanggaran undang – undang perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICTY sendiri terletak di Den Haag, Belanda. Badan ini hanya bisa mengadili orang secara pribadi dan bukan organisasi atau pemerintahan. Hukuman maksimumnya adalah seumur hidup. Beberapa negara telah menandatangani perjanjian dengan PBB mengenai pelaksanaan hukuman ini, salah satunya adalah negara Serbia.

Dalam kasus ini, ICTY memiliki fungsi sebagai pengadilan PBB hukum yang berurusan dengan kejahatan perang yang terjadi selama konflik di Balkan pada tahun 1990. Pengadilan ini kemudian mengambil tempat di Kroasia dan Bosnia – Herzegovina. Tujuan utamanya adalah untuk menangkap orang – orang yang paling bertanggung jawab atas tindakan mengerikan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, perusakan harta benda, perbudakan dan kejahatan lainnya yang tercantum dalam Tribunal Statuta. Dengan membawa pelaku ke pengadilan ICTY bertujuan untuk mencegah kejahatan masa depan dan memberikan keadilan bagi ribuan korban dan keluarga mereka, sehingga memberikan kontribusi untuk perdamaian di negara bekas Yugoslavia.³⁷

Dalam sub bab transformasi hukum ini, penulis akan menjelaskan sedikit konflik yang menjadi hambatan integrasi Serbia ke Uni Eropa serta kerjasama Serbia dengan ICTY untuk menangkap para penjahat sebagai transformasi hukum dalam hak asasi manusia sebagai syarat keanggotaan di Uni Eropa. Berikut adalah penjelasannya;

A. Sejarah Perang Bosnia

Sebelum perang Bosnia (1991-1995) terjadi, Federasi Yugoslavia beranggotakan enam republik bagian (Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, dan Macedonia) dan dua provinsi otonom (Kosovo dan Vojvodina). Federasi tersebut pun mulai bergejolak pada tahun 1990, yang mengakibatkan satu per satu negara bagiannya memutuskan untuk memisahkan diri. Pada tahun 1991, tepatnya pada tanggal 25 juni, Slovenia bersama dengan Kroasia mengumumkan kemerdekaannya. Dua republik bagian Federasi Yugoslavia tersebut menjadi pelopor disintegrasi yang akhirnya diikuti oleh Bosnia-Herzegovina dan Macedonia.

Terjadinya perubahan politik globalisasi membawa pangaruh di negara Federasi Yugoslavia. Perang saudara di Yugoslavia terjadi akibat keputusan Kroasia dan Slovenia memisahkan diri dari negara Federasi Yugoslavia. Hal ini pun membuat Serbia marah karena rencananya mendirikan negara Serbia Raya akan gagal apabila negara-negara bagian

³⁷ *Ibid.*

Yugoslavia satu per satu memisahkan diri. Serbia pun mengambil tindakan dengan melakukan penyerangan ke Slovenia dan Kroasia untuk mengambil kembali wilayah yang sudah merdeka itu menjadi wilayah kekuasaan etnis Serbia.

Keinginan untuk segera melakukan disintegrasi pun juga semakin terlihat di republik bagian Federasi Yugoslavia lainnya. Pada tanggal 15 Oktober 1991, parlemen Bosnia dan Herzegovina melakukan pemungutan suara untuk mengusahakan pelepasan wilayah ini dari Yugoslavia.³⁸ Hasil dari pemungutan suara tersebut menyatakan rakyat Bosnia dan Herzegovina sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Bosnia pun mengumumkan kemerdekaannya di bawah kepemimpinan Ali Izzet Begovic. PBB dan negara-negara besar lalu merestunya, juga lebih dari 120 negara lainnya.

Seperti halnya Bosnia, Macedonia juga melakukan referendum kepada rakyatnya untuk memilih memerdekakan diri atau tetap tinggal dalam federasi. Hasilnya referendum tersebut menyatakan 95,5% rakyat memilih untuk referendum untuk kemerdekaan Macedonia. Penyelenggaraan referendum Macedonia dilaksanakan pada tanggal 8 September 1991.³⁹ Proses kemerdekaan Macedonia relatif lebih aman. Hal ini dikarenakan hampir tidak ada etnis Serbia yang tinggal di Macedonia, sehingga Milosevic tidak melancarkan aksi militer. Macedonia kemudian mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 25 September 1991.⁴⁰ Namun, Federasi Yugoslavia sendiri baru mengakui kemerdekaan Macedonia pada tanggal 8 April 1993 setelah adanya aklamasi dari Majelis Umum PBB tersebut.⁴¹

Sejak memutuskan untuk memisahkan diri dari Federasi Yugoslavia, Bosnia Herzegovina merasakan kedukaan yang mendalam akibat konflik berdarah yang disebabkan oleh Serbia. Hal ini disebabkan keputusan Bosnia memisahkan diri ditentang oleh masyarakat Serbia yang tetap menginginkan Bosnia menjadi wilayah dari negara Serbia. Selain itu juga, etnis Serbia menginginkan untuk menguasai wilayah Bosnia dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Serbia dalam perang tersebut memberlakukan metode penghapusan ras terhadap etnis Bosnia sebagai upaya penghilangan etnis tertentu.

Konflik Bosnia sendiri merupakan konflik antar etnis Serbia dan etnis Bosnia. Yang mana penduduk asli Bosnia menginginkan kemerdekaan penuh bagi negara Bosnia sesuai dengan referendum yang telah dilakukan masyarakat Bosnia. Sedangkan etnis Serbia menentang keras keputusan tersebut. Etnis Serbia dan etnis Bosnia sendiri memang memiliki banyak perbedaan terutama soal keyakinan. Konflik ini kemudian semakin besar mengingat ada upaya-upaya dari etnis Serbia yang didukung oleh tentara dan presidennya untuk melakukan pembersihan etnis terhadap etnis Bosnia.

Serbia pun membombardir habis-habisan ibukota Bosnia, Sarajevo dan kota lainnya. Bahkan gerilyawan Bosnia ditangkap dan disiksa dalam kamp-kamp konsentrasi dan puluhan ribu wanita muda dan gadis kecil Bosnia diperkosa. Data menyebutkan bahwa korban kaum muslimin sepanjang perang ini mencapai 200.000 orang yang terbunuh.⁴² Sampai awal tahun 1993, konflik antara Serbia dan Bosnia masih belum reda meskipun pasukan penjaga

³⁸ *Konflik antara Bosnia dan Serbia pada Tahun 1991*. (2010, Oktober 7). Retrieved Mei 12, 2017, from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/noorkholis_ridho/konflik-antara-bosnia-dan-serbia-pada-tahun-1991_550122fb813311fb16fa8372

³⁹ Susilo, T. A. (2009). *Mengenal Benua Eropa*. Yogyakarta: Garasi. Diakses Mei 12, 2017, hlmn. 144

⁴⁰ Sri, S. (2014). *BAB IV DAMPAK PERANG BOSNIA*. Diakses Mei 22, 2017, from <http://eprints.uny.ac.id/21749/5/6.BAB%20IV%20.pdf>

⁴¹ Susilo, T. A. (2009). *Op.cit.*

⁴² *Konflik antara Bosnia dan Serbia pada Tahun 1991*. (2010, Oktober 7). *Op.cit.*

perdamaian PBB yang terdiri atas tentara Amerika Serikat, Inggris, Perancis telah melakukan operasi pemeliharaan perdamaian.

Di tahun 1995, dinamika konflik Bosnia semakin meningkat. Hal ini dikarenakan pembantaian ribuan etnis Serbia di Srebrenica pada Juli 1995 membuat konflik ini semakin berkepanjangan. Sekitar 8.000 etnis Bosnia, yang sebagian besar adalah pria dan anak laki-laki, dibantai dalam aksi yang paling biadab dalam sejarah Eropa.⁴³ Pembantaian ini dimulai ketika para pengungsi yang berasal dari etnis Serbia melakukan pelarian ke wilayah Srebrenica yang merupakan wilayah aman yang dijaga oleh pasukan NATO. Namun, ternyata itu hanyalah tipuan dari tentara Serbia untuk melakukan pembunuhan massal terhadap etnis Bosnia. Bahkan, pasukan Belanda yang berjaga di lokasi tersebut tidak mampu berbuat apa pun. Dalang pembantaian itu Radovan Karadzic, yang saat itu menjabat pemimpin perang Bosnia Serbia, dan Jenderal Ratko Mladic. Di wilayah ini kemudian ditemukan kuburan massal etnis Bosnia yang di kubur secara massal oleh tentara Serbia.

Dalam menyelesaikan perang Bosnia ini banyak Komunitas Internasional membantu untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Bosnia. Seperti adanya pengiriman pasukan perdamaian yang dilakukan oleh PBB, NATO dan juga upaya perundingan yang diprakarsai oleh Uni Eropa dan juga Amerika Serikat. Bahkan PBB pada tahun 1992 membentuk UNPROFOR (*United Nation Protection Force*) yaitu pasukan perdamaian yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian di negara-negara pecahan Yugoslavia, termasuk Bosnia. Pasukan perdamaian ini terdiri dari negara Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis dan Indonesia tergabung dalam UNPROFOR ini.

Setelah upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB, Uni Eropa dan negara-negara lainnya mengalami kegagalan dalam kurun waktu 1992 hingga 1994. Pada bulan Mei tahun 1995 pakta keamanan atlantik (NATO) mengambil keputusan untuk melakukan invasi militer ke wilayah Serbia.⁴⁴ Invasi tersebut mendapat dukungan dari PBB dan Uni Eropa serta Amerika Serikat. Target operasi militer yang dilakukan oleh NATO ini adalah untuk menghancurkan infrastruktur-infrastruktur yang ada di wilayah Serbia. Serangan yang dilakukan oleh NATO tersebut berhasil melumpuhkan infrastruktur yang ada di Serbia. NATO juga berhasil memaksa Serbia untuk mau duduk dan melakukan perundingan dengan Bosnia untuk mencapai kesepakatan.

Akhirnya pada bulan November tahun 1995 Serbia dan Bosnia kembali berunding dan melakukan perjanjian di Dayton Amerika Serikat.⁴⁵ Perjanjian Dayton adalah perjanjian untuk menghentikan perang di Bosnia yang sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir. Perjanjian ini disetujui di Pangkalan Udara Wright-Patterson di Dayton, Ohio.

B. Dampak Perang Bosnia

Setiap konflik maupun perang yang terjadi selalu memberikan dampak bagi wilayah sekitarnya. Dampak tersebut juga dialami oleh masyarakat baik yang secara langsung menjadi korban maupun masyarakat yang tidak secara langsung terkena dampak dari konflik tersebut. Perang tersebut pun menyisakan dampak yang begitu hebat. Lebih dari 150.000 orang meninggal, lebih dari dua juta penduduk terusir dari rumah dan wilayahnya, gedung-gedung dan fasilitas umum hangus terbakar, serta ratusan masjid dan gereja hancur tak berbentuk lagi.⁴⁶

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Sri, S. (2014). *Op.cit.*

Jumlah tersebut pun terus bertambah seiring dengan adanya penemuan-penemuan dan identifikasi terhadap korban-korban perang yang dibuang setelah dibunuh oleh milisi Serbia. Setiap desa maupun kota yang semula dihuni ribuan penduduk dari berbagai etnis menjadi tampak lengang. Hanya tinggal beberapa yang masih bertahan di zona aman.



Gambar 4.3.1. Bekas Luka Konflik di Kota Bosnia

Sumber: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/selarung-waktu/16/04/01/o4xglz377-sejarah-hari-ini-mantan-presiden-yugoslavia-ditangkap-setelah-pengepungan-36-jam>

Selama perang berlangsung pun, negara-negara sekitarnya juga mengalami dampak dari perang tersebut. Seperti pengungsi-pengungsi yang lari dan kabur dari Kroasia pada bulan April dan Mei 1992. Mereka pun diusir dari rumah mereka dengan alasan identitas kebangsaan mereka. Pengusiran ini merupakan bagian dari proyek pembersihan etnis yang dilakukan oleh Serbia. Terhitung hingga akhir tahun 1992 sekitar 3,5 juta jiwa yang didominasi etnis Muslim menjadi pengungsi dengan 600.000 jiwa diantaranya menyusup ke Eropa Barat dan sisanya bertahan di tanah sendiri.⁴⁷ Bahkan Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, Austria dan Hungaria adalah tujuan akhir mereka untuk mengadu nasib setelah terusir dari wilayahnya.

Dampak Perang Bosnia sendiri lebih banyak dirasakan oleh Kroasia. Hal ini pun dikarenakan cukup banyaknya etnis Kroasia yang tinggal di Bosnia. Ketika perang terjadi, etnis Kroasia yang berada di Bosnia turut terlibat pertempuran sengit dengan etnis Muslim maupun etnis Serbia. Hal ini membuat pemerintah pusat Republik Kroasia di Zagreb pun turun tangan. Sejumlah pasukan dan alat berat didatangkan ke Bosnia untuk bertempur membantu etnis Kroasia yang berada di Bosnia. Selain itu, Pemerintah Kroasia juga memberikan pasokan senjata maupun kebutuhan lain untuk etnis Kroasia di Bosnia. Meskipun demikian, pemerintah Kroasia tetap membuka pintu bagi para korban perang yang kebanyakan adalah warga sipil. Pemerintah Kroasia pun membuka kamp pengungsian di Zagreb dan menurunkan sejumlah tim dokter ke Bosnia.

Dampak lain juga dirasakan di negara bagian dan provinsi otonom yang masih tergabung dengan Federasi. Seperti yang dirasakan oleh etnis Albania di Kosovo, yang mana etnis Albania adalah pemeluk agama Islam. Sentimen dari etnis Albania pun semakin mengeras dengan

⁴⁷ Uchrowi, F. G. (1993). *Dor! Sarajevo: Sebuah rekaman Jurnalistik Nestapa Muslim Bosnia*. Bandung: Mizan. Retrieved Mei 22, 2017

adanya pembantaian umat Muslim di Bosnia. Konflik antara etnis Albania dengan etnis Serbia di Kosovo pun telah berlangsung sejak lama. Bahkan, konflik yang terjadi di Bosnia menjadi puncak dari konflik etnis yang sudah terjadi berlarut-larut di Kosovo. Kosovo pun akhirnya mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 2008.

Serbia yang telah mengobarkan api perang tersebut pun mengalami kerugian yang cukup besar. Setelah Perjanjian Dayton Republik Federasi Yugoslavia yang terdiri dari Serbia dan Montenegro pun memulai perjalanan terisolasinya dari komunitas internasional. Bahkan, Serbia dituduh menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas pembantaian terhadap etnis Muslim Bosnia. Serbia juga harus mengganti rugi yang telah dilakukannya kerusakan di Bosnia. Selain memporak-porandakan kehidupan penduduk Bosnia, perang ini juga menghancurkan sebagian besar bangunan di seluruh Bosnia. Mulai dari rumah-rumah penduduk, gedung-gedung penting, pertokoan, pasar, sekolah-sekolah, hingga bangunan-bangunan bersejarah tidak dapat difungsikan lagi. Selain itu, Pemerintah Bosnia juga harus membenahi perekonomian agar mata uang yang telah diterbitkan sejak Bosnia kemerdekaannya dapat kembali stabil.

C. Keputusan Serbia Untuk Melakukan Kerjasama Dengan ICTY

Tindakan Serbia di masa lalu dalam menorehkan sejarah perang di Balkan memang tidak ada habisnya. Sebagai tokoh utama pembersihan etnis Muslim Bosnia membuat Serbia menuai banyak protes dari dunia internasional. Kecaman dari sejumlah tokoh besar dunia tak juga memunculkan rasa malunya Serbia. Sanksi-sanksi atas tindakan brutal yang telah diterima tidak sedikitpun membuatnya jera. Sehingga setelah perang tersebut berakhir Serbia pun tetap melanjutkan kehidupan negaranya meskipun dalam dunia yang terisolasi dari negara-negara lain.

Semua perjuangan yang dilakukan Serbia pun berakhir sia-sia, setelah para penjahat perang Bosnia satu per satu berhasil ditangkap. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan perang Bosnia sebagai pembersihan etnis Bosnia yang dilakukan oleh etnis Serbia. PBB juga memutuskan untuk membawa kasus ini ke mahkamah internasional untuk kejahatan Yugoslavia (ICTY). Kemudian mahkamah internasional menetapkan beberapa nama sebagai pelaku kejahatan perang di Bosnia terkait dengan pembersihan etnis tersebut. Diantaranya adalah Slobodan Milosevic selaku presiden dari Serbia, Jendral Radovan Karadjic, dan Jendral Ratko Mladic.



Gambar 4.3.2. Slobodan Milosevic

Sumber: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/selarung-waktu/16/04/01/o4xglz377-sejarah-hari-ini-mantan-presiden-yugoslavia-ditangkap-setelah-pegunungan-36-jam>

Pada tahun 2001, Slobodan Milosevic ditangkap oleh pemerintah Serbia dengan berbagai macam tuduhan.⁴⁸ Ketika ditangkap, Milosevic dituduh melakukan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan dituduh sebagai orang misterius di balik pembunuhan lawan politiknya Vuk Draskovic dan Ivan Stambolic. *Transparency International* juga menempatkan Milosevic pada urutan kelima sebagai penguasa terkorp di dunia. Milosevic diketahui telah menggelapkan uang sebesar satu milyar dolar Amerika.⁴⁹ Selain itu, menurut pandangan dunia internasional Milosevic ditangkap dengan dakwaan sebagai dalang dari kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Bosnia. Milosevic pun ditransfer ke Belanda untuk menerima vonis dari tindakan kejahatan perang yang dilakukannya di masa lalu. Milosevic pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan telah diberikan hukuman penjara. Ia akhirnya meninggal di tahanan ketika proses hukuman masih berlangsung.

Tak hanya sampai disitu, penderitaan Serbia pun masih berlanjut dimana Montenegro yang selama ini mendukungnya memutuskan untuk berpisah dari Serbia pada tahun 2006.⁵⁰ Selain itu juga, setahun setelah proses negosiasi Stabilisasi dan Asosiasi Serbia yaitu pada tahun 2005, Uni Eropa memutuskan untuk menghentikan negosiasi perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi tersebut. Hal ini dikarenakan pada tahun 2006, kerjasama pemerintah Serbia dengan ICTY terkait penangkapan para penjahat perang di masa lalu tidak mengalami kemajuan. Setelah kegagalan dalam proses negosiasi perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi pada tahun 2005 terhenti, pemerintah Serbia pun melakukan transformasi atau perubahan dalam bidang hukumnya. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi syarat menjadi keanggotaan Uni Eropa.



Gambar 4.3.3. Radovan Karadžić di Den Haag dan menyamar sebagai Dragan Dabic.

Sumber: <http://edition.cnn.com/2016/03/24/europe/karadzic-war-crimes-verdict/index.html>

Pada tahun 2007, Pemerintah Serbia menegaskan kembali akan melanjutkan kerjasama dengan ICTY untuk menangkap para pejahat perang. Hal tersebut pun didukung dan diapresiasi oleh Uni Eropa. Setahun setelah pengumuman kerjasama kembali, Pemerintah Serbia dan ICTY berhasil menangkap kembali para penjahat perang. Setelah 13 tahun menjadi buronan dunia, mantan Presiden Republik Srpska, Radovan Karadzic berhasil ditangkap pada

⁴⁸ 'Penjahat perang' Bosnia, Jenderal Mladic, ditangkap. (2011, Mei 26). Diakses April 12, 2017, from BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/05/110526_mladicarrest

⁴⁹ Suci, A. (2011). *151 Konspirasi Dunia Paling Gila dan Mencengangkan*. Jakarta: Wahyumedia. Diakses Mei 22, 2017

⁵⁰ Susilo, T. A. (2009). *Op.cit.* hlmn. 144

tanggal 21 Juli 2008.⁵¹ Radovan Karadzic dijatuhi hukuman 40 tahun penjara dalam pengadilan PBB dengan total menghadapi 11 dakwaan.

Dalam Pengadilan PBB tersebut Karadzic dinyatakan bersalah dan mendalangi kekejaman pasukan Serbia saat terjadi perang Bosnia pada 1992-1995 yang menewaskan 100 ribu orang.⁵² Dia juga dikenakan tanggung jawab pidana atas pembunuhan, menyerang warga sipil dan teror mematikan saat terjadi pengepungan selama 44 bulan di ibukota Bosnia, Sarajevo, selama perang. Dalam proses persidangannya, Karadzic mengungkapkan sebuah pernyataan yang mengagetkan. Karadzic menyatakan bahwa pembantaian yang terjadi di Bosnia merupakan sebuah peristiwa yang telah lama diskenariokan oleh dunia.

Tiga tahun kemudian, mantan Panglima Tentara Federal, Jenderal Ratko Mladic, yang menjadi buronan akhirnya berhasil ditangkap oleh badan keamanan Serbia di Lazarevo, dekat Zrenjanin di wilayah Banat, Provinsi Vojvodina pada tanggal 26 Mei 2011.⁵³ Penangkapannya dilakukan oleh pasukan khusus dari kepolisian yang menggunakan seragam hitam dan cadar, serta tanpa menggunakan tanda pengenal apapun. Ratko Mladic merupakan komandan pasukan Bosnia Serbia saat perang saudara di Bosnia-Herzegovina tahun 1992 hingga 1995, sekaligus salah seorang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan terburuk di Eropa sejak Perang Dunia II.⁵⁴ Setelah penangkapan Ratko Mladic, di Beograd Presiden Serbia, Boris Tadic selanjutnya menjanjikan untuk memburu orang-orang yang membantu Ratko Mladic bersembunyi.



**Gambar 4.3.4. Jenderal Serbia, Radko Mladic
(foto dokumentasi tahun 1993, dan 26 Mei 2011)**

Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/pengacara-ratko-mladic-lawan-ekstradisi-kliennya-ke-den-haag-122767294/93747.html>

Di tahun yang sama yakni 2011, Pemerintah Serbia dan ICT berhasil kembali menangkap pejahat perang lainnya. Goran Hadzic yang berusia 52 tahun di Serbia berhasil ditangkap dengan tuduhan kejahatan perang di Kroasia tahun 1991 sampai 1995.⁵⁵ Goran Hadzic sendiri

⁵¹ *Ibid.* Hlmn. 112

⁵² Berlianto. (2016, Maret 24). *Bekas Presiden Serbia Dihukum 40 Tahun untuk Kasus Genosida*. Retrieved Mei 22, 2017, from Sindo News: <https://international.sindonews.com/read/1095664/41/bekas-presiden-serbia-dihukum-40-tahun-untuk-kasus-genosida-1458835877>

⁵³ Sri, S. (2014). *Op.cit.*

⁵⁴ Paramita, C. (Ed.). (2011, Mei 26). *Penangkapan Ratko Mladic Legakan Serbia*. Diakses April 18, 2017, from <http://www.dw.com/id/penangkapan-ratko-mladic-legakan-serbia/a-15109922>

⁵⁵ *Harapan Serbia Masuk Uni Eropa Semakin Kuat*. (2011, Juli 21). Diakses Mei 12, 2017, from <http://www.dw.com/id/harapan-serbia-masuk-uni-eropa-semakin-kuat/a-15256315>

akan diekstradisi dari Serbia ke Tribunal Perang PBB. Goran Hadzic adalah orang terakhir dari 161 terdakwa yang berhasil diserahkan ke Tribunal Perang PBB, dua belas tahun setelah perang Yugoslavia berakhir.⁵⁶ Penangkapan tersebut menjadi sorotan dunia internasional. Penangkapan Goran Hadzic sendiri menjadi hal penting bagi citra Serbia, baik di wilayah Balkan, maupun di wilayah Eropa lainnya. Uni Eropa menjadikan penangkapan ini sebagai salah satu syarat untuk masuknya Serbia sebagai anggota. Meskipun Goran Hadzic bukanlah pembunuh paling brutal di wilayah Balkan, namun dengan ditangkapnya Hadzic, Serbia telah memenuhi semua tuntutan internasional. Dengan begitu semakin kuat harapan Serbia, bahwa akhirnya pintu menuju Eropa terbuka.

⁵⁶ *Ibid.*